

Judul : Banggar: benahi distribusi dan data penerima subsidi
Tanggal : Kamis, 01 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Subsidi Energi Capai Rp 261,5 Triliun

Banggar: Benahi Distribusi Dan Data Penerima Subsidi

Senayan menyepakati pemangkasan subsidi energi menjadi sebesar Rp 261,5 triliun pada tahun 2027. Jumlah itu lebih rendah dari usulan awal di Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang mencapai Rp 272,9 triliun atau turun sebesar Rp 11,44 triliun.

KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, terjadi penyesuaian volume dan efisiensi besaran anggaran jika dibandingkan dengan usulan awal dari Pemerintah. Namun, kesepakatan mengenai penurunan sejumlah anggaran subsidi ini tidak berarti perhatian terhadap kelompok miskin menurun.

"Penurunan subsidi tersebut disertai dengan pembenahan data penerima subsidi, sehingga akan lebih tepat sasaran dan mengoptimalkan anggaran subsidi energi kita," ujar Said di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Diketahui, anggaran subsidi energi pada tahun 2027 menjadi sebesar Rp 261,5 triliun. Rinciannya, volume BBM bersubsidi yang disepakati turun menjadi 19,5 juta

Kilo Liter (KL) yang terdiri dari minyak tanah 561 ribu KL dan minyak solar 19 juta KL, dibandingkan usulan awal 20 juta KL.

Penyesuaian juga terjadi pada kuota volume elpiji tabung 3 kg yang disepakati sebesar 8 juta Metrik Ton (MT) turun dari usulan awal 8,9 juta MT. Alokasi anggaran untuk subsidi BBM dan elpiji tabung 3 kg disepakati menjadi Rp 131 triliun. Terdiri dari elpiji 3 Kg sebesar Rp 103 triliun dan jenis BBM tertentu sebesar Rp 28 triliun.

Said melanjutkan, langkah pembenahan data penerima subsidi ini akan memperbaiki kesalahan penyaluran subsidi energi yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Karena mereka yang berada di desil bawah malah cenderung



Said Abdullah

kurang mendapat manfaat atas pelaksanaan subsidi energi.

"Jadi penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penerima subsidi akan terus disempurnakan oleh Pemerintah," imbuh politisi PDIP ini.

Anggota Komisi XII DPR Jamaludin Malik menambahkan, subsidi energi sebesar Rp 261,5 triliun bukan angka yang kecil. Ini menunjukkan negara tetap

hadir menjaga keterjangkauan energi dan melindungi daya beli masyarakat.

"Sekarang yang paling penting adalah memastikan setiap rupiah subsidi itu benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak dan membutuhkan," kata Jamaludin di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Menurutnya, penyesuaian anggaran dan volume subsidi perlu dibarengi dengan perbaikan data penerima serta pengawasan distribusi. Efisiensi subsidi jangan sampai mengurangi hak masyarakat yang memang membutuhkan, tetapi harus dilakukan dengan mengurangi kebocoran dan penggunaan subsidi oleh kelompok yang tidak berhak.

Dia mengingatkan, masyarakat yang memang berhak jangan sampai kesulitan mendapatkan BBM, elpiji 3 kilogram maupun listrik bersubsidi. "Sebaliknya, masyarakat yang mampu jangan mengambil bagian subsidi yang sebenarnya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan," ujar dia mengingatkan.

Selain itu, ia mendukung penyempurnaan DTSEN sebagai salah satu basis untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi. Bila datanya semakin akurat, maka distribusinya mudah diawasi dan kebocorannya bisa ditekan, sehingga anggaran negara akan semakin efektif.

"Jadi bukan sekadar berapa besar subsidi, tetapi apakah manfaatnya benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak," tegas politisi Golkar ini.

Jamaludin berharap, kebijakan subsidi energi berjalan seiring dengan agenda Pemerintah memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Masyarakat yang membutuhkan tetap dilindungi, sementara produksi dan sumber energi dalam negeri terus kita perkuat.

"Dengan begitu ketahanan energi nasional semakin kuat, subsidi semakin tepat sasaran, dan manfaat APBN semakin besar dirasakan rakyat," pungkas legislator asal Jawa Tengah (Jateng) ini. ■ TIF